

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRACT	xiii
INTISARI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	15
A. Latar Belakang	15
B. Rumusan Masalah	27
C. Tujuan Penelitian	27
D. Manfaat Penelitian	28
E. Studi Pustaka	28
F. Sistematika Penulisan Tesis	33
BAB II KERANGKA TEORI	35
A. Implementasi Kebijakan Penjatuhan Hukuman Disiplin ...	35
B. Faktor-Faktor Pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan	53
1. Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn	54
2. Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle	56
3. Model Implementasi Kebijakan George C. Edwards	57
4. Model Implementasi Kebijakan Sabatier dan Mazmanian	62
5. Model Implementasi Kebijakan Ripley dan Franklin	63
C. Kerangka Pikir	64

BAB III METODE PENELITIAN	71
A. Lokasi Penelitian	71
B. Jenis Penelitian	71
C. Strategi Penelitian	72
D. Sumber Data	73
E. Definisi Operasional	74
F. Teknik Pengumpulan Data	77
G. Teknik Analisis Data	80
BAB IV DESKRIPSI LOKASI DAN SUBJEK PENELITIAN	83
A. Deskripsi Umum Provinsi Sumatera Barat	83
1. Letak Geografis	84
2. Kondisi Demografi	88
3. Kondisi Pegawai	91
4. Deskripsi Umum Mengenai Peraturan Disiplin PNS	99
B. Deskripsi Lokasi Penelitian	116
1. Dasar Hukum	116
2. Visi dan Misi	117
3. Kondisi Pegawai	118
4. Tugas Pokok dan Fungsi	121
5. Susunan Organisasi	122
C. Identitas Informan	128
BAB V ANALISIS HASIL PENELITIAN	130
A. Implementasi Kebijakan Penjatuhan Hukuman Disiplin	
Disiplin PNS	130
1. Pelaksanaan Penjatuhan Hukuman Disiplin	
PNS oleh Pemprov. Sumbar	130
2. Pengawasan	137
3. Pemanggilan dan Laporan Pelanggaran Disiplin	143
4. Pemeriksaan	149
5. Sidang Majelis Pertimbangan Pegawai	159

6. Penyerahan Surat Keputusan	169
B. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi	
Kebijakan Penjatuhan Hukuman Disiplin	176
1. Komunikasi	176
2. Sumber Daya	184
3. Disposisi	191
4. Struktur Birokrasi	196
BAB VI PENUTUP	210
A. Kesimpulan	210
B. Saran	212
DAFTAR PUSTAKA	214
LAMPIRAN	218

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah PNS yang dijatuhi hukuman disiplin Tahun 2011-2015	17
Tabel 2	Perbedaan PP No. 53 Tahun 2010 dan PP No. 30 Tahun 1980	20
Tabel 3	Jumlah Aparatur Pengawas Internal Pemerintah di Inspektorat Provinsi Sumatera Barat 2013-2015	24
Tabel 4	Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin PNS	47
Tabel 5	Beberapa Peraturan dan Pasal Penting dalam Implementasi Kebijakan Penjatuhan Hukuman Disiplin	49
Tabel 6	Nama dan Luas Ibukota Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat	86
Tabel 7	Luas Kecamatan dan Jumlah Kelurahan di Kota Padang	87
Tabel 8	Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2015	88
Tabel 9	Jumlah Penduduk Kota Padang Tahun 2013	90
Tabel 10	Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Tahun 2010 – 2015	91
Tabel 11	Jumlah PNS Laki-Laki dan Perempuan Menurut Golongan Tahun 2013 – 2015	92
Tabel 12	Jumlah PNS Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2013 – 2015	93
Tabel 13	Jumlah PNS Berdasarkan Eselon dan Jabatan Fungsional Tahun 2010 – 2015	94
Tabel 14	Jumlah PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin dan Persentasenya Dengan Jumlah PNS Pemprov Sumbar Tahun 2011 – 2015 ..	94
Tabel 15	Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS dan Pasal yang Dilanggar Berdasarkan Jenis Hukuman Disiplin Tahun 2015 ..	96
Tabel 16	Komposisi Pegawai BKD Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2015	119

Tabel 17	Perbedaan Rekomendasi Inspektorat Dengan Putusan Sidang MPP Tahun 2015	154
Tabel 18	Susunan Keanggotaan Majelis Pertimbangan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	162
Tabel 19	Waktu Penyelesaian Kasus Dari Laporan Hasil Pemeriksaan Hingga SK Keluar	167
Tabel 20	Perbedaan Kondisi yang Seharusnya dan Kenyataan di Lapangan dari Implementasi Kebijakan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS	174
Tabel 21	Jabatan Auditor dan P2UPD di Lingkungan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat	185
Tabel 22	Daftar Penerimaan Uang Sidang Tim Majelis Pertimbangan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Untuk Sidang Tanggal 25 Juli 2016	192
Tabel 23	Matrix Implementasi Kebijakan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS serta Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi	206

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Prosedur Penjatuhan Hukuman Disiplin	53
Gambar 2	Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn	56
Gambar 3	Model Implementasi Kebijakan Edward III	62
Gambar 4	Model Implementasi Kebijakan Sabatier dan Mazmanian	63
Gambar 5	Kerangka Berfikir Implementasi Kebijakan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS di Lingkungan Pemprov. Sumatera Barat	65
Gambar 6	Model Analisis Interaktif Miles dan hiberman	82
Gambar 7	Komposisi Pegawai BKD Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2015	119
Gambar 8	Persentase Pegawai BKD Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Tingkat Pendidikan	120
Gambar 9	Komposisi Pegawai BKD Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Golongan Tahun 2015	150

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Standar Operasional Prosedur (SOP) BKD tentang Penyelesaian Pelanggaran dan Penjatuhan Sanksi PNS
- Lampiran 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) BKD tentang Pemberhentian Sementara kepada Pegawai
- Lampiran 3. Alur Pelayanan Penanganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat
- Lampiran 4. Pedoman Wawancara